RENCANA KERJA DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 273 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja, dan pendanaan untuk tahun anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.

Renja ini disusun berdasarkan hasil analisis terhadap pendapat para pemangku kepentingan (*stakeholders*), hasil analisis terhadap pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial sampai tahun berjalan (2023), dan hasil analisis terhadap dampak berbagai krisis yang menimbulkan permasalahan sosial yang semakin kompleks serta hasil evaluasi terhadap perubahan paradigma yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan yang terjadi dalam sisa periode RPJMD.

Diharapkan Renja ini dapat mengarahkan pembangunan kesejahteraan sosial yang ingin dicapai pada tahun 2024 dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial.

Tanjungpinang, 23 Juni 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS SOSIAL

Drs. EKO SUMBARYADI
NIP. 19631117 199103 1 013

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 21

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 24

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 26

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 36

BAB III TUJUAN DAN SASARAN 38

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 38

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial 42

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL 47

BAB V PENUTUP 55

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan *Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah*, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Korban Bencana;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Korban Bencana;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Korban Bencana;

d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Perlindungan Korban Bencana; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Sosial merupakan penjabaran Renstra Dinas Sosial yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Kepulauan Riau. Renja Dinas Sosial memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Sosial dalam satu tahun anggaran. Renja Dinas Sosial menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Renja Dinas Sosial mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Sosial diawali dengan persiapan penyusunan renja, dilanjutkan dengan Penyusunan Rancangan Renja Dinas Sosial, Forum SKPD, dan Penetapan Renja Dinas Sosial.

1. **Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

   Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah mencakup: (1) Penyusunan rancangan keputusan kepala perangkat daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah; (2) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah; (3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan (4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. **Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah**

   Aktivitas dalam penyusunan Rancangan Renja Dinas Sosial meliputi: (1) Perumusan Rancangan Renja Perangkat Daerah, dan (2) Penyajian Rancangan Renja Perangkat Daerah. Perumusan rancangan Renja Dinas Sosial mencakup: (a) Pengolahan data dan informasi; (b) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah; (c) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; (d) Telaahan terhadap rancangan awal Perangkat Daerah; (e) Perumusan tujuan dan sasaran; (f) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat; (g) Perumusan kegiatan prioritas; (h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah; (i) Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah; (j) Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan (k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, dan arahan menteri terkait.

3. **Forum Perangkat Daerah**

   Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten. Dalam forum Perangkat Daerah ini rancangan Renja Dinas Sosial dibahas, sehingga diperoleh masukan perbaikan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

4. **Penetapan Renja SKPD**

   Pada tahap ini, rancangan Renja Dinas Sosial yang telah disempurnakan dan sesuai dengan RKPD kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan-peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Sosial ialah sebagai berikut:

1. Peraturan-peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau ialah sebagai berikut:
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

27. Permendagri 81 tahun 2022 tentang Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);

29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);

30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 7);

31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
35. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 553);
36. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);
37. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 754).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana kerja ini adalah penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan Dinas Sosial ke dalam rencana tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Tujuan

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Dinas Sosial ke dalam program dan kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial;

b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program dan kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2024;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2024; berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah; Program dan Kegiatan tahun 2024.

Bab IV Penutup, berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2024.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tahun lalu (2022) merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2021-2026. Secara umum, target kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 tercapai dengan kategori baik. Meskipun demikian, terdapat dua indikator kinerja program yang perlu diperhatikan karena capaiannya tidak mencapai 100% yaitu:

1. Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi.

   Target : 52% (130 org)
   Realisasi : 44,80% (112 org)
   Capaian : 86,15%

2. Persentase taman makam pahlawan yang dikelola.

   Target : 33,33% (3 unit)
   Realisasi : 11,11% (1 unit)
   Capaian : 33,33%

Ketidaktercapaian tersebut disebabkan adanya kebijakan refocusing anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mengalihkan prioritas anggaran pada pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

Secara terperinci, evaluasi pelaksanaan Renja 2022 dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022 diperlihatkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

Lembar : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 06 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	%	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00%**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
1 06 01 1.01	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya Perencanaan Perangkat daerah**	%	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00%**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
		Persentase terlaksananya Penganggaran Perangkat Daerah	%	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00%**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
		Persentase terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	%	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00%**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
1 06 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	dok	5		1	1	100,00%	1	2	40,00 %
1 06 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	dok	5		1	1	100,00%	1	2	40,00 %
1 06 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja serta Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	lap	10		2	2	100,00%	2	4	40,00 %
1 06 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	lap	5		1	1	100,00%	1	2	40,00 %
1 06 01 1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	%	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00%**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
1 06 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org	37		39	39	100,00%	44	44	100,00 %
1 06 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang menerima Administrasi Pelaksanaan tugas	org	29		34	34	100,00%	32	34	100,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 06 01 1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	%	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00%**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
1 06 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan pengamanan barang milik daerah SKPD	lap	5		1	1	100,00%	1	2	40,00 %
1 06 01 1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	%	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00%**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
1 06 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	org	54		0	0	0,00%	56	56	100,00 %
1 06 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	org	25		1	1	100,00%	1	2	8,00 %
1 06 01 1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	%	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00%**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
1 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	unit	1.120		252	252	100,00%	279	531	47,41 %
1 06 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	unit	2.890		304	304	100,00%	803	1.107	38,30 %
1 06 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	unit	11.020		1.308	1.308	100,00%	1.274	2.582	23,43 %
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	eks	431.155		47.005	47.005	100,00%	12	47.017	10,90 %
1 06 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	eks	20.065		240	240	100,00%	1.403	1.643	8,19 %
1 06 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	lap	5		1	1	100,00%	1	2	40,00 %
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	rpt/ konsul	1.990		300	300	100,00%	1	301	15,13 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 06 01 1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	%	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00%**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
1 06 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	unit	2		1	1	100,00%	1	1	50,00 %
1 06 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	unit	5		0	0	0,00%	0	0	0,00 %
1 06 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	unit	10		16	16	100,00%	14	30	100,00 %
1 06 01 1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	%	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00%**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	lap	5		1	1	100,00%	1	2	40,00 %
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	lap	5		1	1	100,00%	1	2	40,00 %
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	org	17		16	16	100,00%	16	16	94,12 %
1 06 01 1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		%	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00%**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
1 06 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan	unit	3		3	3	100,00%	3	3	100,00 %
1 06 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan	unit	10		118	118	100,00%	63	181	100,00 %
1 06 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi	unit	1		1	1	100,00%	1	1	100,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 06 02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi**	**%**	**19,05**		**2,98**	**35,71**	**1200,00%**	**13,69**	**49,40**	**100,00%**
		Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau	**%**	**100,00**		**52,00**	**44,80**	**86,15%**	**51,60**	**66,40**	**66,40%**
1 06 02 1.02	**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	**Jumlah lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi**	lbg	**64**		**10**	**120**	**1200,00%**	**46,00**	**166**	**100,00%**
		Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM) yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	org	**250**		**130**	**112**	**86,15%**	**129,00**	**166**	**66,40%**
1 06 02 1.02 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Potensi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	org	175		55	37	67,27%	54	91	52,00 %
1 06 02 1.02 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan (TKSK) yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	org	75		75	75	100,00%	75	75	100,00 %
1 06 02 1.02 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	lbg	64		10	120	1200,00%	46	166	100,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 06 04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti**	**%**	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00%**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
		Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	**%**	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00%**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
		Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia	**%**	**25,00**		**25,00**	**25,00**	**100,00%**	**25,00**	**25,00**	**100,00%**
		Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	**%**	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00%**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
		Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	**%**	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00%**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
		Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	**%**	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00%**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
1 06 04 1.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	**Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti**	org	**1.158,00**		**957,00**	**957,00**	**100,00%**	**394,00**	**1.351,00**	**100,00%**
1 06 04 1.01 03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	org					-	126	126	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 06 04 1.01 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	org	1.158		957	957	100,00%	268	1.225	100,00 %
		Jumlah lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	lbg	3		1	1	100,00%	1	1	33,33 %
1 06 04 1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	**Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti**	org	**787**		**715**	**715**	**100,00%**	**618**	**1.343**	**100,00%**
		Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak yang tersedia	unit	**1**		**1**	**1**	**100,00%**	**1**	**1**	**100,00%**
1 06 04 1.02 04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak terlantar yang tersedia	unit	1		1	1	100,00%	1	1	100,00 %
		Jumlah ABH dan AMPK yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	org	94		10	10	100,00%	10	20	21,28 %
1 06 04 1.02 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	org	693		715	715	100,00%	608	1.323	100,00 %
		Jumlah lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	lbg	15		23	23	100,00%	11	23	100,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 06 04 1.03	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	**Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti**	org	**900**		**950**	**950**	**100,00%**	**320**	**1.270**	**100,00%**
1 06 04 1.01 03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	org					-	20	20	-
1 06 04 1.03 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	org	900		950	950	100,00%	300	1.250	100,00 %
		Jumlah lembaga penyelenggara pelayanan sosial lanjut usia terlantar yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	lbg	3		4	4	100,00%	3	4	100,00 %
1 06 04 1.04	**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**	**Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti**	org	**50**		**11**	**11**	**100,00%**	**22**	**33**	**66,00%**
1 06 04 1.01 03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	org					-	22	22	-
1 06 04 1.04 10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti	org	50		11	11	100,00%	22	33	66,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 06 04 1.05	**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti**	**Jumlah tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti**	org	**500**		**2.018**	**2.018**	**100,00%**	**1.825**	**1.959**	**100,00%**
1 06 04 1.05 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	lbg	2		0	0	0,00%	0	0	0,00 %
		Jumlah tuna sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	org	0		50	50	100,00%	25	75	-
1 06 04 1.05 10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	org	500		1.968	1.968	100,00%	1.800	1.884	100,00 %
1 06 05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif**	**%**	**0,72**		**0,17**	**0,42**	**250,00%**	**0,17**	**0,59**	**80,98%**
		Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	**%**	**5,84**		**0,79**	**9,20**	**1163,80%**	**13,30**	**22,51**	**100,00%**
		Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	**%**	**31,63**		**31,63**	**36,92**	**116,73%**	**36,62**	**36,92**	**100,00%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 06 05 1.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	**Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)**	**KK**	**635**		**150**	**465**	**310,00%**	**116**	**581**	**91,50%**
		Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	**KK**	**280**		**60**	**60**	**100,00%**	**100**	**160**	**57,14%**
		Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	**KK**	**7.390**		**1.000**	**11.638**	**1163,80%**	**16.820**	**28.458**	**100,00%**
		Jumlah PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	**KK**	**39.996**		**39.996**	**46.686**	**116,73%**	**46.296**	**46.686**	**100,00%**
		Jumlah dokumen data terpadu kesejahteraan sosial yang dipublikasikan	**dok**	**5**		**1**	**1**	**100,00%**	**1**	**2**	**40,00%**
1 06 05 1.02 01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	KK	5.290		400	5.917	0,00%	7.520	13.437	100,00 %
		Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	KK	1.500		300	3.921	1307,00%	6.800	10.721	100,00 %
		Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	KK	600		300	1.800	600,00%	2.500	4.300	100,00 %
		Jumlah PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi	KK	39.996		39.996	46.686	116,73%	46.296	46.686	100,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Terevaluasinya pendistribusian raskin/rastra.	lok	7		7	7	100,00%	7	7	100,00 %
1 06 05 1.02 02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data terpadu kesejahteraan sosial yang dipublikasikan	dok	5		1	1	100,00%	1	2	40,00 %
1 06 05 1.02 02	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP	KK	210		50	190	380,00%	26	216	100,00 %
		Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP	KK	160		50	125	250,00%	10	135	84,38 %
		Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP	KK	265		50	150	300,00%	80	230	86,79 %
		Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan melalui mekanisme KUBE	KK	40		20	20	100,00%	30	50	100,00 %
		Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan melalui mekanisme KUBE	KK	120		20	0	0,00%	40	40	33,33 %
		Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan melalui mekanisme KUBE	KK	120		20	40	200,00%	30	70	58,33 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 06 06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar**	**%**	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00%**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
1 06 06 1.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	**Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar**	**org**	**167**		**200**	**200**	**100,00%**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
1 06 06 1.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan permakanan	org	167		200	200	100,00%	200	200	100,00%
		Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial yang tersedia	unit	1		1	1	100,00%	1	1	100,00%
1 06 06 1.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan sandang	org	167		200	200	100,00%	200	200	100,00%
1 06 06 1.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah kelompok rentan bencana yang mendapatkan penanganan khusus	klmpk	4		0	0	0,00%	1	1	25,00%
1 06 06 1.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima mendapatkan dukungan psikososial	org	167		200	200	100,00%	200	200	100,00%
1 06 07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase taman makam pahlawan yang dikelola**	**%**	**33,33**		**33,33**	**11,11**	**33,33%**	**22,22**	**33,33**	**100,00%**
1 06 07 1.01	**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	**Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola**	**unit**	**3**		**3**	**1**	**33,33%**	**2,00**	**3,00**	**100,00%**
1 06 07 1.01 01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah taman makam pahlawan yang dibangun	unit	1		0	0	0,00%	0	0	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	3a	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 06 07 1.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara	unit	3		3	1	33,33%	2	3	100,00%
		Jumlah pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan yang mendapat bantuan kesejahteraan sosial	org	433		433	433	100,00%	433	433	100,00%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara terperinci, analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2022 diperlihatkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi	Proyeksi			Catatan Analisis
					2022 (tnn n-2)	2023 (tnn n-1)	2024 (tnn n)	2025 (tnn n+1)	2022 (tnn n-2)	2023 (tnn n-1)	2024 (tnn n)	2025 (tnn n+1)	
1	2	3	4		8				11	12	12	12	13
1	**Persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**		Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif	%	0,17	0,15	0,08	0,08	0,42	0,17	0,63	0,08	
			Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	0,79	0,71	0,47	0,47	9,20	13,30	10,04	0,47	
			Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	%	31,63	31,63	31,63	31,63	36,92	36,62	36,92	31,63	
2	**Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	**Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	Terpenuhinya kebutuhan dasar Anak Telantar di dalam panti	Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia	%	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	25,00	
4	**Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	**Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	Terpenuhinya kebutuhan dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam panti	Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	**Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan sosial provinsi	Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	**Persentase PSKS kelembagaan yang sesuai dengan standar minimal pelayanan**		Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	%	2,98	3,27	1,79	2,08	35,71	36,61	36,61	2,08	
8	**Persentase PSKS perseorangan yang sesuai standar minimal pekerjaan sosial**		Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	%	52,00	46,00	21,60	31,60	44,80	54,80	54,80	31,60	

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi	Proyeksi			Catatan Analisis
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
					(tnn n-2)	(tnn n-1)	(tnn n)	(tnn n+1)	(tnn n-2)	(tnn n-1)	(tnn n)	(tnn n+1)	
1	2	3	4		8				11	12	12	12	13
9	**Persentase taman makam pahlawan yang dikelola**		Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	%	33,33	33,33	33,33	33,33	11,11	33,33	33,33	33,33	
10	**Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**		Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	**Nilai akuntabilitas kinerja**		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12	**Persentase ASN yang mencapai nilai prestasi kerja sangat baik**												
13	**Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)**												

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

a. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

   1) Masih rendahnya tingkat keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah baik antara RKPD dengan RPJMD, dan renja dengan renstra.

   2) Penganggaran dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial masih jauh dari nilai yang ideal.

   3) Masih kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki.

   4) Alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan kompleksitas dan banyaknya permasalahan sosial yang dihadapi.

   5) Petunjuk teknis pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) belum dapat dijadikan sebagai instrumen yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan dan indikator pengawasan.

b. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

   1) Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.

   2) Pilar partisipan pembangunan kesejahteraan sosial seperti pekerja sosial masyarakat, organisasi masyarakat, karang taruna, WKSBM, TKSM, belum dapat menunjukkan peran dan fungsinya secara nyata dalam rangka pengentasan PPKS.

   3) Terbatasnya sarana komunikasi dan angkutan menjadi kendala dalam upaya penanggulangan bencana.

4) Kurangnya kesadaran, kemampuan, dan kemandirian PPKS.

5) Belum optimalnya akurasi data PPKS/PSKS di Provinsi Kepulauan Riau.

6) SDM pelaku pembangunan kesejahteraan, baik kuantitas maupun kualitasnya masih belum memadai.

c. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1) Banyaknya dukungan dari berbagai pihak untuk menyusun dokumen perencanaan yang baik.

2) Tersedianya sarana sistem informasi yang berbasis elektronik dalam perencanaan.

3) Banyaknya bimbingan teknis dan pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas SDM aparatur kesejahteraan sosial.

4) Tersedianya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penyelenggaraan kesejahteraan sosial, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam.

f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

h. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamanatkan bahwa penanganan permasalahan kemiskinan menjadi tanggung jawab institusi sosial secara berjenjang dari pusat hingga Kabupaten/Kota.

i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1) Banyaknya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, tetapi cakupannya penanganannya masih rendah.

2) Belum tersedianya panti sosial berbentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

3) Masih rendahnya partisipasi PSKS dalam penanganan PPKS.

4) Masih kurangnya sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024, secara umum telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan program dan kegiatan dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan.

Secara terperinci, review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau terlihat pada Tabel 2.3.

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Prov. Kepri**	**Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor**	**100,00**	**%**	**12.907.124.240**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Prov. Kepri**	**Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor**	**100,00**	**%**	**12.907.124.240**	
1.06.01.1.01	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Prov. Kepri**	**Persentase terlaksananya Perencanaan Perangkat daerah**	**100,00**	**%**	**625.000.000**	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Prov. Kepri**	**Persentase terlaksananya Perencanaan Perangkat daerah**	**100,00**	**%**	**625.000.000**	
			Persentase terlaksananya Penganggaran Perangkat Daerah	**100,00**	**%**				**Persentase terlaksananya Penganggaran Perangkat Daerah**	**100,00**	**%**		
			Persentase terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	**100,00**	**%**				**Persentase terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**100,00**	**%**		
1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kepri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	dok	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kepri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	dok	25.000.000	
1.06.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prov. Kepri	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dok	184.835.611	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prov. Kepri	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dok	184.835.611	
1.06.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Kepri	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	lap	215.164.389	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Kepri	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	lap	215.164.389	
1.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kepri	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	lap	200.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kepri	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	lap	200.000.000	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daera**	**Prov. Kepri**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100,00**	**%**	**9.849.804.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daera**	**Prov. Kepri**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100,00**	**%**	**9.849.804.000**	
1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	504	org/bln	9.215.500.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	468	504	9.215.500.000	
1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prov. Kepri	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	dok	634.304.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prov. Kepri	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	634.304.000	
1.06.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prov. Kepri**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100,00**	**%**	**101.711.144**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prov. Kepri**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100,00**	**%**	**101.711.144**	
1.06.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Prov. Kepri	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	lap	101.711.144	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Prov. Kepri	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	lap	101.711.144	

No	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1.06.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prov. Kepri**	**Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100,00**	**%**	**69.028.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prov. Kepri**	**Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100,00**	**%**	**69.028.000**	
1.06.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prov. Kepri	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	56	pkt	49.028.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prov. Kepri	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	56	pkt	49.028.000	
1.06.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prov. Kepri	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	org	20.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prov. Kepri	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	org	20.000.000	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prov. Kepri**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100,00**	**%**	**834.800.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prov. Kepri**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100,00**	**%**	**834.800.000**	
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov. Kepri	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	pkt	14.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prov. Kepri	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	pkt	14.000.000	
1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prov. Kepri	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	pkt	31.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prov. Kepri	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	pkt	31.000.000	
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prov. Kepri	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	pkt	77.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prov. Kepri	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	pkt	77.000.000	
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prov. Kepri	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	pkt	85.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prov. Kepri	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	pkt	85.000.000	
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prov. Kepri	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	dok	10.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prov. Kepri	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	dok	10.800.000	
1.06.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prov. Kepri	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	lap	17.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prov. Kepri	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	lap	17.000.000	
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kepri	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	lap	600.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kepri	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	lap	600.000.000	
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prov. Kepri**	**Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100,00**	**%**	**246.600.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prov. Kepri**	**Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100,00**	**%**	**246.600.000**	
1.06.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Kepri	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	unit	96.600.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Kepri	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	unit	96.600.000	
1.06.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Prov. Kepri	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	pkt	50.000.000	Pengadaan Mebel	Prov. Kepri	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	pkt	50.000.000	
1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Kepri	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	unit	100.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Kepri	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	unit	100.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prov. Kepri**	**Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100,00**	**%**	**843.074.096**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prov. Kepri**	**Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100,00**	**%**	**843.074.096**	
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Kepri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	lap	29.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Kepri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	lap	29.000.000	
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. Kepri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	lap	80.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov. Kepri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	lap	80.000.000	
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Kepri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	lap	734.074.096	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov. Kepri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	lap	734.074.096	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prov. Kepri**	**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100,00**	**%**	**337.107.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prov. Kepri**	**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100,00**	**%**	**337.107.000**	
1.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Kepri	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	unit	188.107.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov. Kepri	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	unit	188.107.000	
1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Kepri	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63	unit	74.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov. Kepri	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63	unit	74.000.000	
1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prov. Kepri	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	75.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prov. Kepri	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	75.000.000	
1 06 02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Prov. Kepri**	**Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi**	**36,61**	**%**	**4.774.692.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Prov. Kepri**	**Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi**	**36,61**	**%**	**4.774.692.000**	
			Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	**54,80**	**%**				**Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi**	**54,80**	**%**		
1 06 02 1.02	**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	**Prov. Kepri**	**Jumlah lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi**	**123**	**lbg**	**4.774.692.000**	**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	**Prov. Kepri**	**Jumlah lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi**	**123**	**lbg**	**4.774.692.000**	
			Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM) yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	**137**	**org**				**Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM) yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi**	**137**	**org**		

No	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1 06 02 1.02 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	60	org	191.160.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	60	org	191.160.000	
1 06 02 1.02 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	77	org	483.532.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	77	org	483.532.000	
1 06 02 1.02 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	123	lbg	4.100.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	123	lbg	4.100.000.000	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Prov. Kepri**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti**	**100,00**	**%**	**5.481.141.048**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Prov. Kepri**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti**	**100,00**	**%**	**5.481.141.048**	
			Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	**100,00**	**%**				**Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti**	**100,00**	**%**		
			Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia	**100,00**	**%**				**Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia**	**100,00**	**%**		
			Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	**100,00**	**%**				**Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti**	**100,00**	**%**		
			Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	**100,00**	**%**				**Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti**	**100,00**	**%**		
			Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	**100,00**	**%**				**Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti**	**100,00**	**%**		
1.06.04.1.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	**Prov. Kepri**	**Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti**	**90**	**org**	**1.276.637.048**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	**Prov. Kepri**	**Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti**	**90**	**org**	**1.276.637.048**	
1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	90	org	432.000.000	Penyediaan Permakanan	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	90	org	432.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	90	org	86.400.000	Penyediaan Sandang	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	90	org	86.400.000	
1.06.04.1.01.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	90	org	283.237.048	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	90	org	283.237.048	
1.06.04.1.01.04	Penyediaan Alat Bantu	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu danAlat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	90	org	100.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu danAlat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	90	org	100.000.000	
1.06.04.1.01.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	90	org	25.000.000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	90	org	25.000.000	
1 06 04 1.01 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Prov. Kepri	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	90	org	350.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Prov. Kepri	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	90	org	350.000.000	
1.06.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	**Prov. Kepri**	**Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti**	**700**	**org**	**2.697.024.000**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	**Prov. Kepri**	**Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti**	**700**	**org**	**2.697.024.000**	
			Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak yang tersedia	**1**	**unit**				**Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak yang tersedia**	**1**	**unit**		
1.06.04.1.02.01	Pengasuhan	Prov. Kepri	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	20	org	35.000.000	Pengasuhan	Prov. Kepri	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	20	org	35.000.000	
1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	700	org	1.315.350.000	Penyediaan Makanan	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	700	org	1.315.350.000	
1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	700	org	263.070.000	Penyediaan Sandang	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	700	org	263.070.000	
1.06.04.1.02.04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	12	org	308.604.000	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	12	org	308.604.000	

No	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*	*10*		*11*	*12*
1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	700	org	75.000.000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	700	org	75.000.000	
1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Prov. Kepri	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	700	org	700.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Prov. Kepri	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	700	org	700.000.000	
1.06.04.1.03	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	**Prov. Kepri**	**Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti**	**128**	**org**	**1.163.480.000**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	**Prov. Kepri**	**Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti**	**128**	**org**	**1.163.480.000**	
1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	128	org	230.400.000	Penyediaan Permakanan	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	128	org	230.400.000	
1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	128	org	46.080.000	Penyediaan Sandang	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	128	org	46.080.000	
1.06.04.1.03.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	128	org	380.000.000	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	128	org	380.000.000	
1.06.04.1.03.04	Penyediaan Alat Bantu	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	36	org	72.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	36	org	72.000.000	
1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	128	org	40.000.000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	128	org	40.000.000	
1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Prov. Kepri	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	128	org	375.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Prov. Kepri	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	128	org	375.000.000	
1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan	Prov. Kepri	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	2	org	20.000.000	Pemulasaraan	Prov. Kepri	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	2	org	20.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1.06.04.1.04	**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**	**Prov. Kepri**	**Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti**	**25**	**org**	**194.000.000**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**	**Prov. Kepri**	**Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti**	**25**	**org**	**194.000.000**	
1.06.04.1.04.01	Penyediaan Permakanan	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	25	org	45.000.000	Penyediaan Permakanan	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	25	org	45.000.000	
1.06.04.1.04.02	Penyediaan Sandang	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	25	org	9.000.000	Penyediaan Sandang	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	25	org	9.000.000	
1.06.04.1.04.03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	25	org	25.000.000	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	25	org	25.000.000	
1.06.04.1.04.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	25	org	5.000.000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Prov. Kepri	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	25	org	5.000.000	
1.06.04.1.04.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Prov. Kepri	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	25	org	35.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Prov. Kepri	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	25	org	35.000.000	
1.06.04.1.04.10	Pemulangan ke Daerah Asal	Prov. Kepri	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	25	org	75.000.000	Pemulangan ke Daerah Asal	Prov. Kepri	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	25	org	75.000.000	
1.06.04.1.05	**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti**	**Prov. Kepri**	**Jumlah tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti**	**510**	**org**	**150.000.000**	**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti**	**Prov. Kepri**	**Jumlah tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti**	**510**	**org**	**150.000.000**	
1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Prov. Kepri	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	10	org	25.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Prov. Kepri	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	10	org	25.000.000	
1.06.04.1.05.10	Pemulangan ke Daerah Asal	Prov. Kepri	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	500	org	125.000.000	Pemulangan ke Daerah Asal	Prov. Kepri	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	500	org	125.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1 06 05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Prov. Kepri**	**Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif**	**0,63**	**%**	**8.886.367.240**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Prov. Kepri**	**Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif**	**0,63**	**%**	**8.886.367.240**	
			Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	**10,04**	**%**				**Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya**	**10,04**	**%**		
			Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	**36,92**	**%**				**Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial**	**36,92**	**%**		
1 06 05 1.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	**Prov. Kepri**	**Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)**	**460**	**KK**	**8.886.367.240**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	**Prov. Kepri**	**Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)**	**460**	**KK**	**8.886.367.240**	
			Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	**340**	**KK**				**Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)**	**340**	**KK**		
			Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	**12.700**	**KK**				**Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya**	**12.700**	**KK**		
			Jumlah PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	**46.686**	**KK**				**Jumlah PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial**	**46.686**	**KK**		
			Jumlah dokumen data terpadu kesejahteraan sosial yang dipublikasikan	**1**	**dok**				**Jumlah dokumen data terpadu kesejahteraan sosial yang dipublikasikan**	**1**	**dok**		
1 06 05 1.02 01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Prov. Kepri	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	59.386	KK	5.142.019.048	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Prov. Kepri	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	59.386	KK	5.142.019.048	
1 06 05 1.02 02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kepri	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	60.186	KK	582.948.192	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kepri	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	60.186	KK	582.948.192	
1 06 05 1.02 02	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Prov. Kepri	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	800	KK	3.161.400.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Prov. Kepri	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	800	KK	3.161.400.000	

No	Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Prov. Kepri**	**Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar**	**100,00**	**%**	**1.122.400.000**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Prov. Kepri**	**Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar**	**100,00**	**%**	**1.122.400.000**	
1.06.06.1.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	**Prov. Kepri**	**Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar**	**350**	**org**	**1.122.400.000**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	**Prov. Kepri**	**Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar**	**350**	**org**	**1.122.400.000**	
1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Prov. Kepri	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	350	org	255.000.000	Penyediaan Permakanan	Prov. Kepri	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	350	org	255.000.000	
1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	350	org	175.000.000	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	350	org	175.000.000	
1.06.06.1.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	350	org	175.000.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	350	org	175.000.000	
1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	350	org	517.400.000	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	350	org	517.400.000	
1 06 07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**		**Persentase taman makam pahlawan yang dikelola**	**33,33**	**%**	**1.425.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**		**Persentase taman makam pahlawan yang dikelola**	**33,33**	**%**	**1.425.000.000**	
1 06 07 1.01	**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**		**Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola**	**3**	**unit**	**1.425.000.000**	**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**		**Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola**	**3**	**unit**	**1.425.000.000**	
1 06 07 1.01 01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1	dok	25.000.000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1	dok	25.000.000	
1 06 07 1.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	3	makam	1.400.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	3	makam	1.400.000.000	
					PAGU TOTAL	**34.596.724.528**						**34.596.724.528**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Secara terperinci, review terhadap penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diperlihatkan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Provinsi Kepulauan Riau

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**				
1.06.02.1.02	**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**				
1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Batam	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	4 org	
1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Tanjungpinang, Bintan, Batam, Karimun, Lingga	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	16 lbg	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				
1.06.04.1.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**				
1.06.04.1.01.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Batam	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	90 org	
1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Batam	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	90 org	
1.06.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti**				
1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Tanjungpinang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	435 org	
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**				
1.06.05.1.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**				
1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Tanjungpinang, Bintan, Lingga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	8.217 KK	
1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	1 keg	
1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Batam	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	220 KK	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan *Permendagri 81 tahun 2022 tentang Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023*:

Tabel 3.1
Arah Kebijakan
Pembangunan Nasional

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN SOSIAL	
	KINERJA	INDIKATOR PROVINSI
1.	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Jumlah lembaga di bidang Kesos yang mendapatkan peningkatan kualitas pelayanan
		Jumlah SDM PKH yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas
		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat
		Jumlah daerah yang melaksanakan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial
		Jumlah daerah yang melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin tanda daftar lembaga
		kesejahteraan sosial
		Jumlah daerah yang aktif melakukan pemantauan dan pengawasan undian gratis berhadiah (UGB) dan
		pengumpulan uang dan barang (PUB)
		Jumlah SDM Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Profesional
2.	Terpenuhi Kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi
		Jumlah Temπpat Penampungan Pengungsi yang Disediakan
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang
		Jumlah Kelompok Rentan yang Mendapatkan Paket Permakanan

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN SOSIAL	
	KINERJA	INDIKATOR PROVINSI
		Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial
3.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga
		Persentase (%) lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan kesehatan dasar
		Jumlah penyandang disabiltas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti
		Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga
		Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
		Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial
		Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket Permakanan di dalam panti sesuai standar gizi
		Jumlah Kelompok Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN SOSIAL	
	KINERJA	INDIKATOR PROVINSI
		mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga
		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti
		Jumlah Kelompok Masyarakat Di Lokasi Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pencegahan Terorisme
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar
		Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi
		Persentase (%) penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial
		Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti
		Jumlah Lanjut Usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti
		Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidilkan dan kesehatan dasar
		Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
		Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti
		Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga
		Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga
		Jumlah Lanjut Usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga
		Persentase (%) anak yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial
		Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
		Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti
		Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan

NO	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN SOSIAL	
	KINERJA	INDIKATOR PROVINSI
		pelayanan reunifikasi keluarga
		Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga
		Jumlah Lanjut Usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga
		Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
		Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti
		Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga
		Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga
		Jumlah Lanjut Usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga
4.	Tersedianya Data Fakir Miskin	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan
		Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Dikembangkan Kapasitasnya
		Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Indikator-indikator dalam program yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 ialah sebagai berikut:

1. Indikator yang terkait dengan penguatan pelaksanaan perlindungan sosial dan Tersedianya Data Fakir Miskin
   - Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif
   - Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya
   - Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial

2. Indikator yang terkait dengan Terpenuhi Kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota
    - Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
3. Indikator yang terkait dengan Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial
    - Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti
    - Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti
    - Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia
    - Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti
    - Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti
    - Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial mendorong pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau di Bidang Kesejahteraan Sosial yang mengarah pada pencapaian prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kepulauan Riau.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan dengan lebih mengoperasionalkan pelaksanaan misi. Tujuan juga mencerminkan adanya prioritas program dan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui perumusan tujuan diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan, program serta kegiatan. Tujuan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau konsisten dengan tugas pokok dan

fungsinya secara kolektif menggambarkan arah strategisnya dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai, yaitu:

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan demikian Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran Dinas Sosial merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 tahun ke depan. Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistim pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

\Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator kinerja masukan dan keluaran dapat dinilai sebelum kegiatan selesai, karena masukan adalah semua bahan termasuk orang, material, alat, dan uang yang digunakan dalam proses untuk menghasilkan output. Sedangkan keluaran adalah suatu wujud atau keadaan yang diciptakan melalui proses yang mempunyai nilai tambah untuk dimanfaatkan.

Untuk indikator hasil, manfaat, dan dampak akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan. Hasil adalah kegunaan langsung dari output atau manfaat suatu output ditinjau dari maksud atau sasaran output tersebut dihasilkan, manfaat adalah kegunaan lebih lanjut yang diharapkan dikaitkan dengan tujuan jangka menengah. Sedangkan dampak adalah kegunaan akhir dari output yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang atau tujuan akhir.

Penetapan Sasaran Dinas Sosial untuk periode Renstra 2021-2026 beserta indikator capaiannya diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai.

Secara terperinci Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Tahun 2024 terlihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran beserta Program Tahun 2024
Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun 2024	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2024
	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat.	1. Meningkatnya kemandirian keluarga miskin	Persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	37,37 %	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif	0,63 %
						Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	10,04 %
						Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi	36,92 %
		2. Meningkatnya fungsi sosial PPKS dalam kehidupan bermasyarakat	a. Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100,00 %	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	100,00 %
						Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia	100,00 %
			b. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100,00 %		Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	100,00 %
			c. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100,00 %		Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	100,00 %
			d. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100,00 %		Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	100,00 %

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun 2024	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2024
			e. Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100,00 %		Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	100,00 %
		3. Meningkatnya peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal	a. Persentase PSKS kelembagaan yang sesuai dengan standar minimal pelayanan	25,63 %	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	36,61 %
			b. Persentase PSKS perseorangan yang sesuai standar minimal pekerjaan sosial	38,36 %		Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	54,80 %
			c. Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	33,33 %	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara	33,33 %
		4. Meningkatnya perlindungan sosial kepada korban bencana alam dan bencana sosial	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100,00 %	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	100,00 %
		5. Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan organisasi	a. Nilai akuntabilitas kinerja	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00 %
			b. Persentase ASN yang mencapai nilai prestasi kerja sangat baik	97,00 %			
			c. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	80,00			

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

a. Mengarah pada perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi gubernur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026,

b. Mengarahkan pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Sosial sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2021-2026.

Secara terperinci program dan kegiatan serta Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 tertuang dalam Tabel 4.1.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN				LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024								CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			KETERANGAN
							TARGET CAPAIAN KINERJA						PAGU INDIKATIF	SUMNER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	
		CAPAIAN PROGRAM	HASIL KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN (SESUAI RENSTRA PD)	KELUARAN SUBKEGIATAN SESUAI KEPMENDAGRI 050-5889 THN 2021		Program		HASIL KEGIATAN		KELUARAN SUB KEGIATAN (SESUAI RENSTRA PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)				TOLAK UKUR	TARGET		
							TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET SATUAN	TARGET SATUAN							
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	**DINAS SOSIAL**												**34.596.724.528**					**17.433.899.392**	
01.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**												**34.596.724.528**					**17.433.899.392**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor**				**Prov. Kepri**	**100,00 %**						**12.907.124.240**	**APBD**		**Persentase terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100,00 %**	**14.698.468.987**	
1.06.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase terlaksananya Perencanaan Perangkat daerah**			**Prov. Kepri**			**100,00 %**				**625.000.000**	**APBD**		**Persentase terlaksananya Perencanaan Perangkat daerah**	**100,00 %**	**625.000.000**	
			Persentase terlaksananya Penganggaran Perangkat Daerah						**100,00 %**							**Persentase terlaksananya Penganggaran Perangkat Daerah**	**100,00 %**		
			Persentase terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat daerah						**100,00 %**							**Persentase terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**100,00 %**		
1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kepri					1 dok	1 dok	25.000.000	APBD		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dok	25.000.000	
1.06.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prov. Kepri					1 dok	1 dok	184.835.611	APBD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	250.000.000	
1.06.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja serta Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Kepri					2 lap	2 lap	215.164.389	APBD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 lap	150.000.000	
1.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kepri					1 lap	1 lap	200.000.000	APBD		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 lap	200.000.000	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**Prov. Kepri**			**100,00 %**				**9.849.804.000**	**APBD**		**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100,00 %**	**10.580.068.000**	
1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Kepri					42 org	504 org/bln	9.215.500.000	APBD		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	504 org/ bln	9.858.500.000	
1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah ASN yang menerima Administrasi Pelaksanaan tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prov. Kepri					32 org	1 dok	634.304.000	APBD		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dok	721.568.000	
1.06.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**Prov. Kepri**			**100,00 %**				**101.711.144**	**APBD**		**Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100,00 %**	**58.440.000**	
1.06.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah laporan pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						1 lap	1 dok	101.711.144	APBD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dok	58.440.000	
1.06.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**Prov. Kepri**			**100,00 %**				**69.028.000**	**APBD**		**Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100,00 %**	**64.072.000**	
1.06.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Prov. Kepri					56 org	56 pkt	49.028.000	APBD		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	56 pkt	44.072.000	
1.06.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Prov. Kepri					5 org	5 org	20.000.000	APBD		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 org	20.000.000	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Prov. Kepri**			**100,00 %**				**834.800.000**	**APBD**		**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100,00 %**	**1.082.839.665**	
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Prov. Kepri					224 unit	1 pkt	14.000.000	APBD		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 pkt	16.800.000	
1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Prov. Kepri					578 unit	1 pkt	31.000.000	APBD		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 pkt	18.000.000	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN				LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024								CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			KETERANGAN
							TARGET CAPAIAN KINERJA						PAGU INDIKATIF	SUMNER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	
		CAPAIAN PROGRAM	HASIL KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN (SESUAI RENSTRA PD)	KELUARAN SUBKEGIATAN SESUAI KEPMENDAGRI 050-5889 THN 2021		Program		HASIL KEGIATAN		KELUARAN SUB KEGIATAN (SESUAI RENSTRA PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)			TOLAK UKUR	TARGET		
							TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN					
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14	15	16	17	18
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Prov. Kepri					2204 unit		1 pkt		77.000.000	APBD		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 pkt	72.500.000	
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Prov. Kepri					86231 eks		1 pkt		85.000.000	APBD		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 pkt	98.000.000	
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Prov. Kepri					4013 eks		1 dok		10.800.000	APBD		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dok	32.000.000	
1.06.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prov. Kepri					1 lap		1 lap		17.000.000	APBD		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 lap	11.200.000	
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kepri					398 rpt/ konsul		1 lap		600.000.000	APBD		umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 lap	834.339.665	
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**Prov. Kepri**			**100,00**	**%**					**246.600.000**	**APBD**		**Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100,00 %**	**628.444.885**	
1.06.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah pengadaan kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Prov. Kepri					1 unit		1 unit		96.600.000	APBD		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	117.294.885	
1.06.01.1.07.05	Pengadaan Mebel			Jumlah pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Prov. Kepri					2 unit		1 pkt		50.000.000	APBD		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 pkt	226.650.000	
1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Prov. Kepri					10 unit		10 unit		100.000.000	APBD		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	284.500.000	
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Prov. Kepri**			**100,00**	**%**					**843.074.096**	**APBD**		**Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100,00 %**	**862.000.000**	
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prov. Kepri					1 lap		1 lap		29.000.000	APBD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 lap	18.000.000	
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Prov. Kepri					1 lap		1 lap		80.000.000	APBD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 lap	56.000.000	
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Prov. Kepri					16 org		1 lap		734.074.096	APBD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 lap	788.000.000	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Prov. Kepri**			**100,00**	**%**					**337.107.000**	**APBD**		**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100,00 %**	**797.604.437**	
1.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Prov. Kepri					3 unit		3 unit		188.107.000	APBD		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 unit	234.000.000	
1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Prov. Kepri					63 unit		63 unit		74.000.000	APBD		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	174.000.000	
1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prov. Kepri					1 unit		1 unit		75.000.000	APBD		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	389.604.437	
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi**				**Prov. Kepri**	**36,61**	**%**							**4.774.692.000**	**APBD**		**Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi**	**2,08 %**	**584.498.555**	
		Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi					**54,80**	**%**										**Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi**	**31,60 %**		
1.06.02.1.02	**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**		**Jumlah lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi**			**Prov. Kepri**			**123**	**lbg**					**4.774.692.000**	**APBD**		**Jumlah lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi**	**7 lbg**	**584.498.555**	
			Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM) yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi						**137**	**org**								**Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM) yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi**	**79 org**		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN				LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			KETERANGAN
							TARGET CAPAIAN KINERJA				PAGU INDIKATIF	SUMNER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	
		CAPAIAN PROGRAM	HASIL KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN (SESUAI RENSTRA PD)	KELUARAN SUBKEGIATAN SESUAI KEPMENDAGRI 050-5889 THN 2021		Program	HASIL KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN (SESUAI RENSTRA PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)				TOLAK UKUR	TARGET		
							TARGET SATUAN	TARGET SATUAN	TARGET SATUAN	TARGET SATUAN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi			Jumlah Potensi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri			60 org	60 org	191.160.000	APBD		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	51 org	191.550.000	
1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi			Jumlah tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan (TKSK) yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	Prov. Kepri			77 org	77 org	483.532.000	APBD		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	28 org	43.400.000	
1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi			Jumlah lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri			123 lbg	123 lbg	4.100.000.000	APBD		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	7 lbg	349.548.555	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti**				**Prov. Kepri**	**100,00 %**				**5.481.141.048**	**APBD**		**Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti**	**100,00 %**	**602.535.815**	
		Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti					**100,00 %**							**Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti**	**100,00 %**		
		Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia					**100,00 %**							**Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia**	**25,00 %**		
		Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti					**100,00 %**							**Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti**	**100,00 %**		
		Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti					**100,00 %**							**Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti**	**100,00 %**		
		Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti					**100,00 %**							**Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti**	**100,00 %**		
1.06.04.1.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**		**Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti**			**Prov. Kepri**		**90 org**			**1.276.637.048**	**APBD**		**Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti**	**60 org**	**125.100.000**	
1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri				90 org	432.000.000	APBD					**SPM**
1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri				90 org	86.400.000	APBD					**SPM**
1.06.04.1.01.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri				90 org	283.237.048	APBD					**SPM**
1.06.04.1.01.04	Penyediaan Alat Bantu				Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu danAlat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri				90 org	100.000.000	APBD					**SPM**
1.06.04.1.01.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi					90 org	25.000.000	APBD					**SPM**
1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri			90 org	90 org	350.000.000	APBD		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 org	125.100.000	**SPM**
				Jumlah lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi					1 lbg	1 lbg							

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN				LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024								CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			KETERANGAN
		CAPAIAN PROGRAM	HASIL KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN (SESUAI RENSTRA PD)	KELUARAN SUBKEGIATAN SESUAI KEPMENDAGRI 050-5889 THN 2021		TARGET CAPAIAN KINERJA						PAGU INDIKATIF	SUMNER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	
							Program		HASIL KEGIATAN		KELUARAN SUB KEGIATAN (SESUAI RENSTRA PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)			TOLAK UKUR	TARGET		
							TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN					
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14	15	16	17	18
1.06.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti**		**Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti** **Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak yang tersedia**			**Prov. Kepri**			**700 org** **1 unit**						**2.697.024.000**	**APBD**		**Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti** **Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak yang tersedia**	**68 org** **1 unit**	**244.335.815**	
1.06.04.1.02.01	Pengasuhan				Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri							20 org		35.000.000	APBD					**SPM**
1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri							700 org		1.315.350.000	APBD					**SPM**
1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri							700 org		263.070.000	APBD					**SPM**
1.06.04.1.02.04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak terlantar yang tersedia Jumlah ABH dan AMPK yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri					1 unit 12 org		12 org		308.604.000	APBD		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	13 org	170.085.815	**SPM**
1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri							700 org		75.000.000	APBD					**SPM**
1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti Jumlah lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri					700 org 106 lbg		700 org		700.000.000	APBD		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	55 org	74.250.000	**SPM**
1.06.04.1.03	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**		**Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti**			**Prov. Kepri**			**128 org**						**1.163.480.000**	**APBD**		**Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti**	**120 org**	**89.400.000**	
1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri							128 org		230.400.000	APBD					**SPM**
1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri							128 org		46.080.000	APBD					**SPM**
1.06.04.1.03.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri							128 org		380.000.000	APBD					**SPM**
1.06.04.1.03.04	Penyediaan Alat Bantu				Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri							36 org		72.000.000	APBD					**SPM**
1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri							128 org		40.000.000	APBD					**SPM**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN				LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			KETERANGAN
							TARGET CAPAIAN KINERJA							TARGET CAPAIAN KINERJA			
		CAPAIAN PROGRAM	HASIL KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN (SESUAI RENSTRA PD)	KELUARAN SUBKEGIATAN SESUAI KEPMENDAGRI 050-5889 THN 2021		Program	HASIL KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN (SESUAI RENSTRA PD)	Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)	PAGU INDIKATIF	SUMNER DANA		TOLAK UKUR	TARGET	PAGU INDIKATIF	
							TARGET SATUAN	TARGET SATUAN	TARGET SATUAN	TARGET SATUAN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti Jumlah lembaga penyelenggara pelayanan sosial lanjut usia terlantar yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri			128 org 9 lbg	128 org	375.000.000	APBD		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	120 org	89.400.000	**SPM**
1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan				Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi					2 org	20.000.000						**SPM**
1.06.04.1.04	**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**		**Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti**			**Prov. Kepri**		**25 org**			**194.000.000**	**APBD**		**Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti**	**10 org**	**31.500.000**	
1.06.04.1.04.01	Penyediaan Permakanan				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri				25 org	45.000.000						**SPM**
1.06.04.1.04.02	Penyediaan Sandang				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri				25 org	9.000.000						**SPM**
1.06.04.1.04.03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses				Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri				25 org	25.000.000						**SPM**
1.06.04.1.04.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri				25 org	5.000.000						**SPM**
1.06.04.1.04.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri				25 org	35.000.000						**SPM**
1.06.04.1.04.10	Pemulangan ke Daerah Asal			Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri			25 org	25 org	75.000.000	APBD		Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	10 org	31.500.000	**SPM**
1.06.04.1.05	**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti**		**Jumlah tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti**			**Prov. Kepri**		**510 org**			**150.000.000**	**APBD**		**Jumlah tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti**	**500 org**	**112.200.000**	
1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			Jumlah lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi Jumlah tuna sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri			1 lbg 10 org	10 org	25.000.000	APBD		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	10 org	15.000.000	
1.06.04.1.05.10	Pemulangan ke Daerah Asal			Jumlah korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal				500 org	500 org	125.000.000	APBD		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	500 org	97.200.000	
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif** **Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya** **Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial**				**Prov. Kepri**	**0,63 %** **10,04 %** **36,92 %**				**8.886.367.240**	**APBD**		**Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif** **Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya** **Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial**	**0,08 %** **0,47 %** **31,63 %**	**944.672.957**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN				LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024								CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			KETERANGAN
		CAPAIAN PROGRAM	HASIL KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN (SESUAI RENSTRA PD)	KELUARAN SUBKEGIATAN SESUAI KEPMENDAGRI 050-5889 THN 2021		TARGET CAPAIAN KINERJA						PAGU INDIKATIF	SUMNER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		PAGU INDIKATIF	
							Program		HASIL KEGIATAN		KELUARAN SUB KEGIATAN (SESUAI RENSTRA PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)			TOLAK UKUR	TARGET		
							TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN					
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14	15	16	17	18
1.06.05.1.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**		**Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)**			**Prov. Kepri**			**460 KK**						**8.886.367.240**	**APBD**		**Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)**	**65 KK**	**944.672.957**	
			Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)						**340 KK**									**Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)**	**40 KK**		
			Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya						**12.700 KK**									**Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya**	**600 KK**		
			Jumlah PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial						**46.686 KK**									**Jumlah PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial**	**39.996 KK**		
			Jumlah dokumen data terpadu kesejahteraan sosial yang dipublikasikan						**1 dok**									**Jumlah dokumen data terpadu kesejahteraan sosial yang dipublikasikan**	**1 dok**		
1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri					4300 KK		59.386 KK		5.142.019.048	APBD		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	40.596 KK	230.037.048	
				Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya		Prov. Kepri					7950 KK										
				Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya		Prov. Kepri					450 KK										
				Jumlah PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial		Prov. Kepri					46.686 KK										
				Terevaluasinya pendistribusian raskin/rastra.		Prov. Kepri					7 Lok										
1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah dokumen data terpadu kesejahteraan sosial yang dipublikasikan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Prov. Kepri					1 dok		60.186 KK		582.948.192	APBD		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	40.701 KK	236.885.909	
1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri					160 KK		800 KK		3.161.400.000	APBD		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	105 KK	477.750.000	
				Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP		Prov. Kepri					220 KK										
				Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP		Prov. Kepri					80 KK										
				Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan melalui mekanisme KUBE		Prov. Kepri					140 KK										
				Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan melalui mekanisme KUBE		Prov. Kepri					140 KK										
				Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan melalui mekanisme KUBE		Prov. Kepri					60 KK										

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN				LOKASI OUTPUT KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024								PAGU INDIKATIF	SUMNER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			KETERANGAN
							TARGET CAPAIAN KINERJA											TARGET CAPAIAN KINERJA			
		CAPAIAN PROGRAM	HASIL KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN (SESUAI RENSTRA PD)	KELUARAN SUBKEGIATAN SESUAI KEPMENDAGRI 050-5889 THN 2021		Program		HASIL KEGIATAN		KELUARAN SUB KEGIATAN (SESUAI RENSTRA PD)		Keluaran Sub Kegiatan (Sesuai Kepmendagri 050-5889 Thn 2021)					TOLAK UKUR	TARGET	PAGU INDIKATIF	
							TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN							
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12	13	14	15	16	17	18
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar**				**Prov. Kepri**	**100,00 %**								**1.122.400.000**	**APBD**		**Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar**	**100,00 %**	**391.614.032**	
1.06.06.1.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**		**Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar**			**Prov. Kepri**			**350 org**						**1.122.400.000**	**APBD**		**Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar**	**170 org**	**391.614.032**	
1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan			Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri					350 org		350 org		255.000.000	APBD		Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	170 org	136.200.000	**SPM**
				Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial yang tersedia							1 unit										
1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang			Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	Prov. Kepri					350 org		350 org		175.000.000	APBD		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	170 org	48.200.000	**SPM**
1.06.06.1.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			Jumlah kelompok rentan bencana yang mendapatkan penanganan khusus	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri					1 klmpk		350 org		175.000.000	APBD		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	170 org	45.014.032	**SPM**
1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial			Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima mendapatkan dukungan psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Prov. Kepri					350 org		350 org		517.400.000	APBD		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	170 org	162.200.000	**SPM**
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase taman makam pahlawan yang dikelola**					**33,33 %**								**1.425.000.000**	**APBD**		**Persentase taman makam pahlawan yang dikelola**	**33,33 %**	**212.109.046**	
1.06.07.1.01	**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**		**Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola**						**3 unit**						**1.425.000.000**	**APBD**		**Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola**	**3 unit**	**212.109.046**	
1.06.07.1.01.02	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			Jumlah taman makam pahlawan yang dibangun	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Prov. Kepri					1 unit		1 dok		25.000.000	APBD		Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 dok	25.000.000	
1 06 07 1.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	v					3 unit		3 makam		1.400.000.000	APBD		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	3 makam	187.109.046	
				Jumlah pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan yang mendapat bantuan kesejahteraan sosial							433 org										
													PAGU TOTAL		**34.596.724.528**					**17.433.899.409**	

BAB V
PENUTUP

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, serta menghasilkan penelitian dan pengembangan yang bermanfaat guna mendukung pencapaian visi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pejabat struktural dan pejabat fungsional di Dinas Sosial agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2024 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan program kerja tahun 2024 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;

3. Guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2024.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Dinas Sosial melaksanakan program dan kegiatan Renja tahun 2024 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

2. Kepala Dinas dibantu Sekretaris melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik.

Dengan adanya Renja Dinas Sosial Tahun 2024, penetapan prioritas pembangunan pada Urusan Sosial diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan. Semoga dengan tersusunnya Renja Dinas Sosial Tahun 2024, mendorong peningkatan kualitas kinerja dapat perannya sebagai perangkat daerah yang menangani Urusan Sosial. Selain itu, diharapkan Rencana Kerja tahun 2024 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial tahun 2021-2026.